

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Penyidik dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidik Polres Kepahiang memainkan peran yang sangat sentral dan multidimensi dalam setiap tahapan proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polri. Tidak hanya menjalankan tugas-tugas teknis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), penyidik juga bertindak sebagai komunikator, fasilitator, dan pelindung hak-hak hukum korban, saksi, serta tersangka. Penekanan pada kemampuan membangun kepercayaan dan komunikasi interpersonal terbukti sangat penting dalam menghadapi hambatan psikologis serta sosial, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri sebagai korban.

Penyidik diharapkan mampu mengintegrasikan pendekatan humanis dalam mengumpulkan keterangan saksi dan korban, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sistematis, penggunaan alat bukti digital, serta koordinasi lintas unit dengan ahli forensik menjadi kunci dalam memperkuat proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, efektivitas upaya pembuktian sangat berpengaruh pada kualitas keadilan substantif yang dihasilkan.

2. Kendala dan Kelemahan yang Dihadapi Penyidik

Penyidik masih menghadapi beragam kendala baik dari aspek internal maupun eksternal. Hambatan utama meliputi minimnya alat bukti, sulitnya memperoleh keterangan saksi yang bersedia berbicara terbuka, dan keterbatasan fasilitas digital forensik di tingkat Polres. Selain itu, kurangnya pelatihan berkala dalam teknik pemeriksaan korban trauma dan pemanfaatan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antarinstansi yang belum berjalan optimal, birokrasi berbelit, tekanan dari masyarakat, serta budaya kekerasan yang masih berkembang, turut memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan. Gap antara regulasi yang telah ada dengan implementasi di lapangan juga masih menjadi persoalan mendasar, termasuk dalam hal perlindungan saksi dan korban. Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian masih perlu diperkuat secara menyeluruh agar tujuan utama penegakan hukum dapat benar-benar tercapai.

B. Saran

1. Bagi Institusi Polri (Polres Kepahiang):

Diharapkan dapat memperkuat program pelatihan dan pengembangan kapasitas penyidik secara rutin dan terarah, baik dalam aspek teknik wawancara korban/saksi trauma maupun pemanfaatan digital forensik. Pengadaan fasilitas teknologi pendukung seperti CCTV, laboratorium digital mini, serta sistem perlindungan saksi dan korban harus

diprioritaskan agar pembuktian menjadi lebih objektif dan profesional.

Selain itu, sosialisasi dan pelatihan terkait pembaruan SOP serta inovasi pembuktian digital harus dijalankan secara konsisten untuk menghadapi dinamika kejahatan modern.

2. Bagi Pemerintah, Pembuat Kebijakan, dan Lembaga Penegak Hukum Terkait:

Diperlukan evaluasi menyeluruh dan harmonisasi regulasi perlindungan aparat, saksi, dan korban tindak pidana penganiayaan. Penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP bersama, serta percepatan birokrasi dalam penanganan perkara menjadi hal yang sangat penting. Forum koordinasi antarinstansi serta komunikasi yang efektif harus terus dibangun guna meminimalisir ego sektoral dan mempercepat penyelesaian kasus. Dengan demikian, diharapkan sistem penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan perlindungan hukum yang semakin kompleks.